



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 514551

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.255.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/90 m² di KAB / KOTA CILACAP, WARISAN Rp. 310.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m²/42 m² di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
3. Tanah Seluas 665 m² di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. Tanah Seluas 1181 m² di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 624.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RAIZE/1.0TGRSCVTTSSSTT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. MOTOR, YAMAHA B6H A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 475.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 350.606.988

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.230.081.988



III. HUTANG

Rp. 246.917.304

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.983.164.684

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : HIMAWAN WAHYU PAMUNGKAS
- Jabatan : SEKRETARIS
- NHK : 762528

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 770.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/70 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah Seluas 492 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 90.000.000

- MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.805.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 66.297.068

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 932.102.068

III. HUTANG Rp. 333.840.000

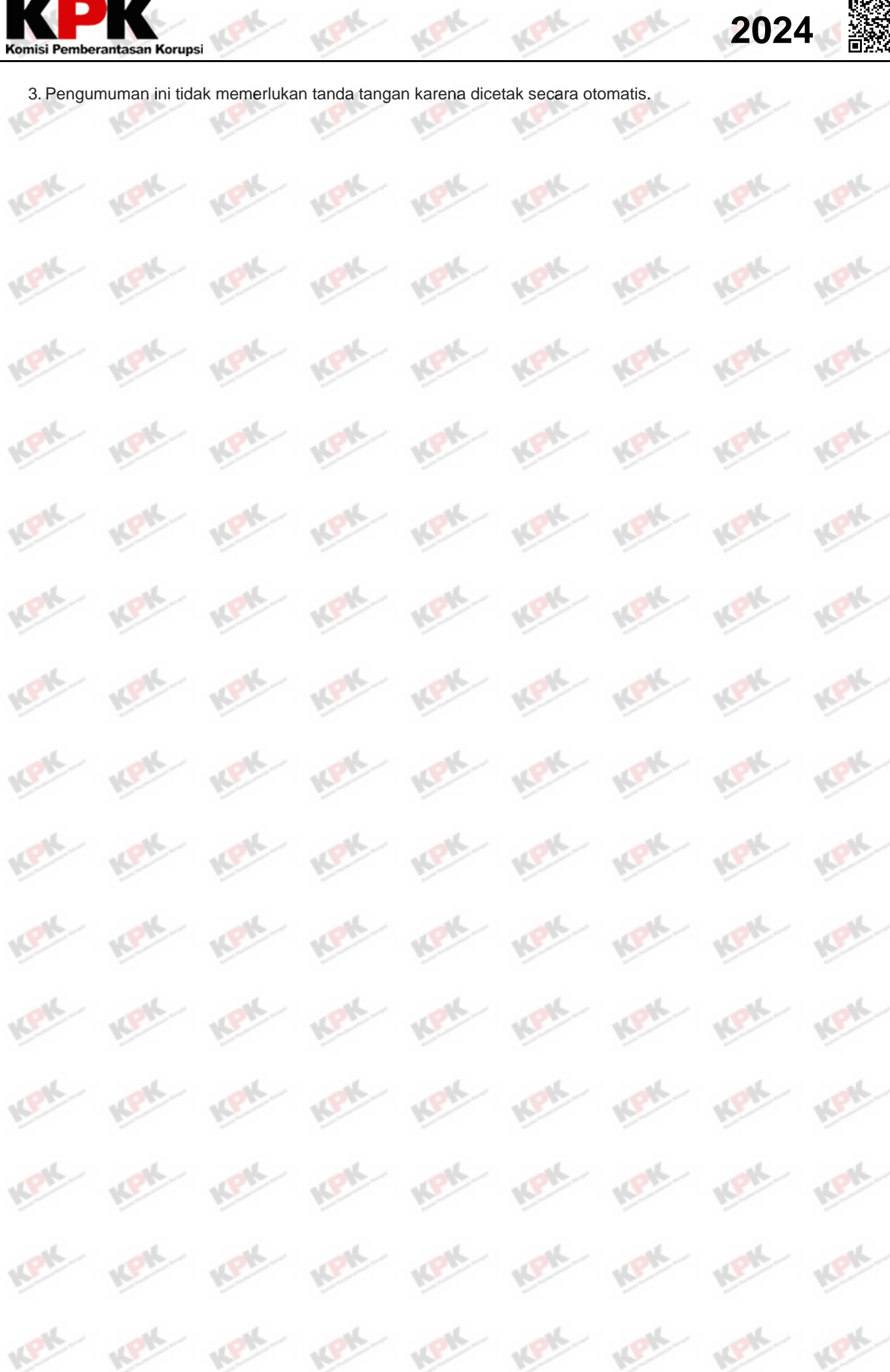
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 598.262.068

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NITA NOVIYANI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
3. NHK : 932079

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/39 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4/MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI BJ175A Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 46.206.407

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 562.206.407

III. HUTANG Rp. 62.434.469

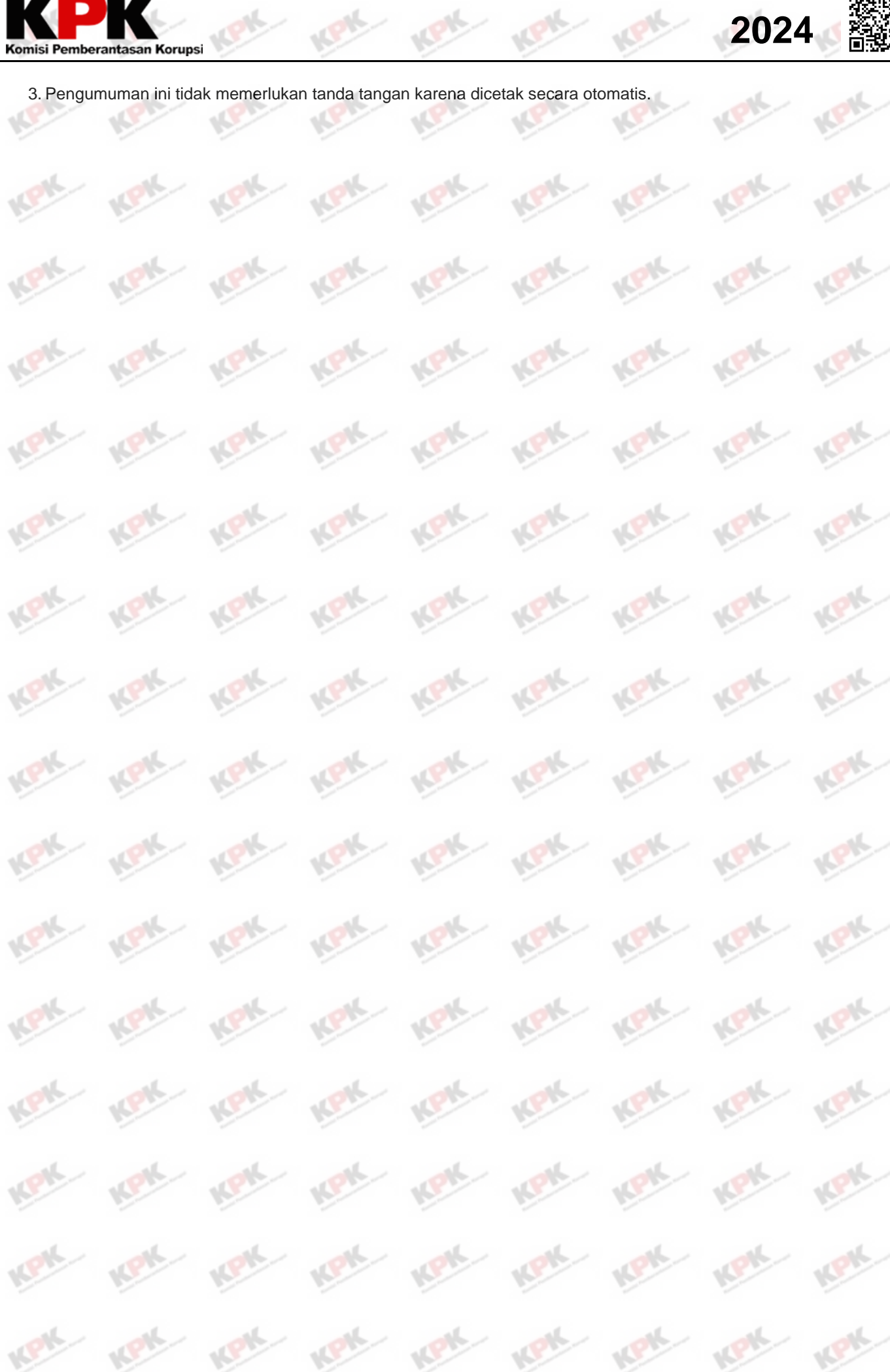
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 499.771.938

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : HENI PURWANTI
- Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
- NHK : 204378

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	182.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
2. MOTOR, HONDA NF125SD Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
3. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 G CVT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	18.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	187.173.316
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	387.873.316

III. HUTANG Rp. 25.194.000

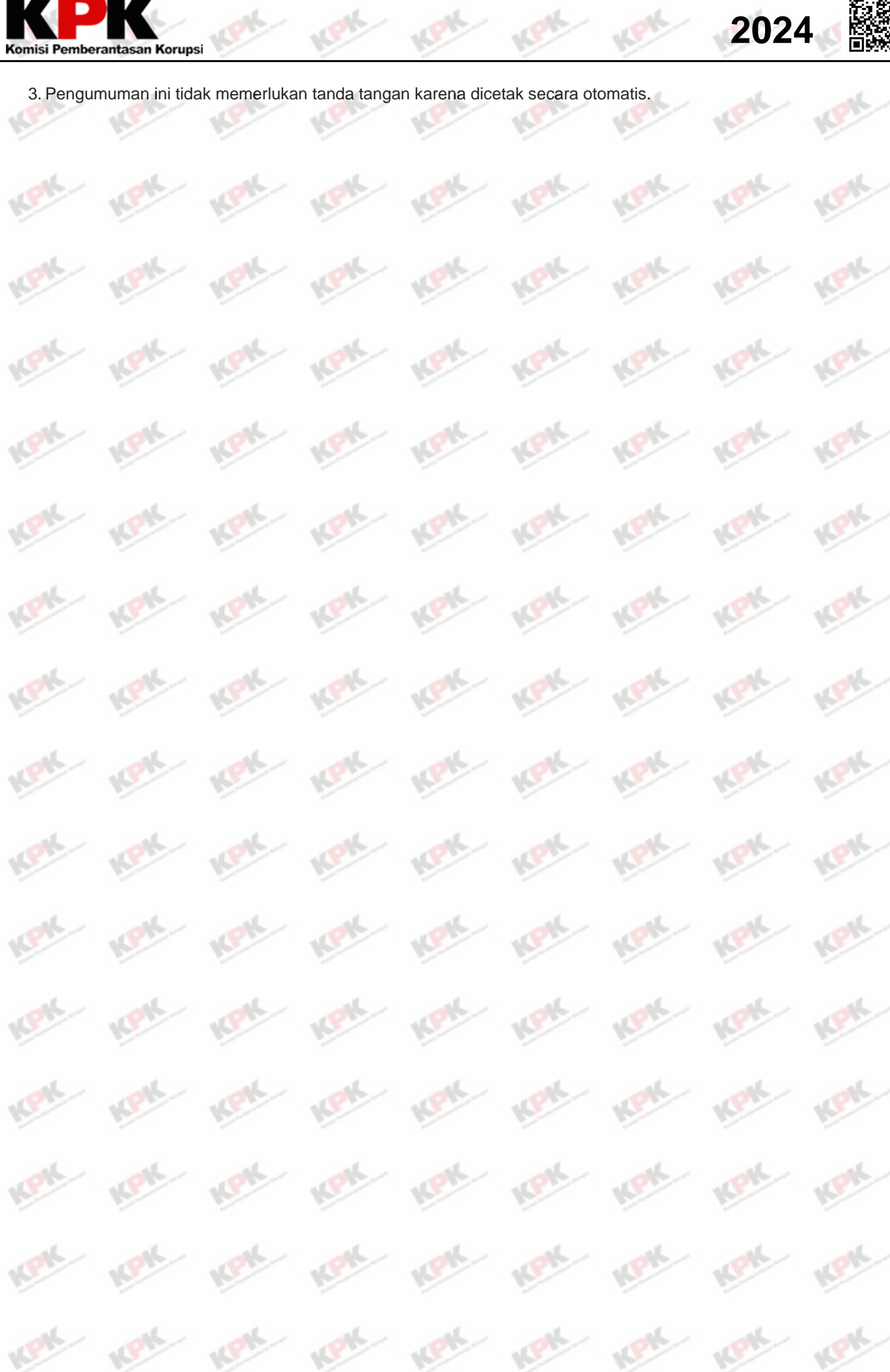
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 362.679.316

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURRIYADI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 224503

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m²/70 m² di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 1.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 65.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU ROCKY JEEP Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.015.897

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.338.515.897

III. HUTANG Rp. 7.700.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.330.815.897

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : HERU DJATMIKA
- Jabatan : KEPALA BIDANG
- NHK : 210079

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 975.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/36 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 361 m2/123 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 432.000.000

- MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
- MOBIL, HONDA BRIO RS MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
- MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO LIF02N37L1 AT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 180.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.413.149

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.599.413.149

III. HUTANG Rp. 16.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.583.413.149

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CISILIA SUNARTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 224420

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 881.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/224 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 881.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 166.000.000

1. MOBIL, RUSH MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.500.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 225.067.273

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.281.567.273

III. HUTANG Rp. 50.917.570

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.230.649.703

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : ANI MULYANI
- Jabatan : KEPALA BIDANG
- NHK : 212673

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 725.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/36 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 164.500.000

- MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 92.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 137.849.022

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.120.099.022

III. HUTANG Rp. ---

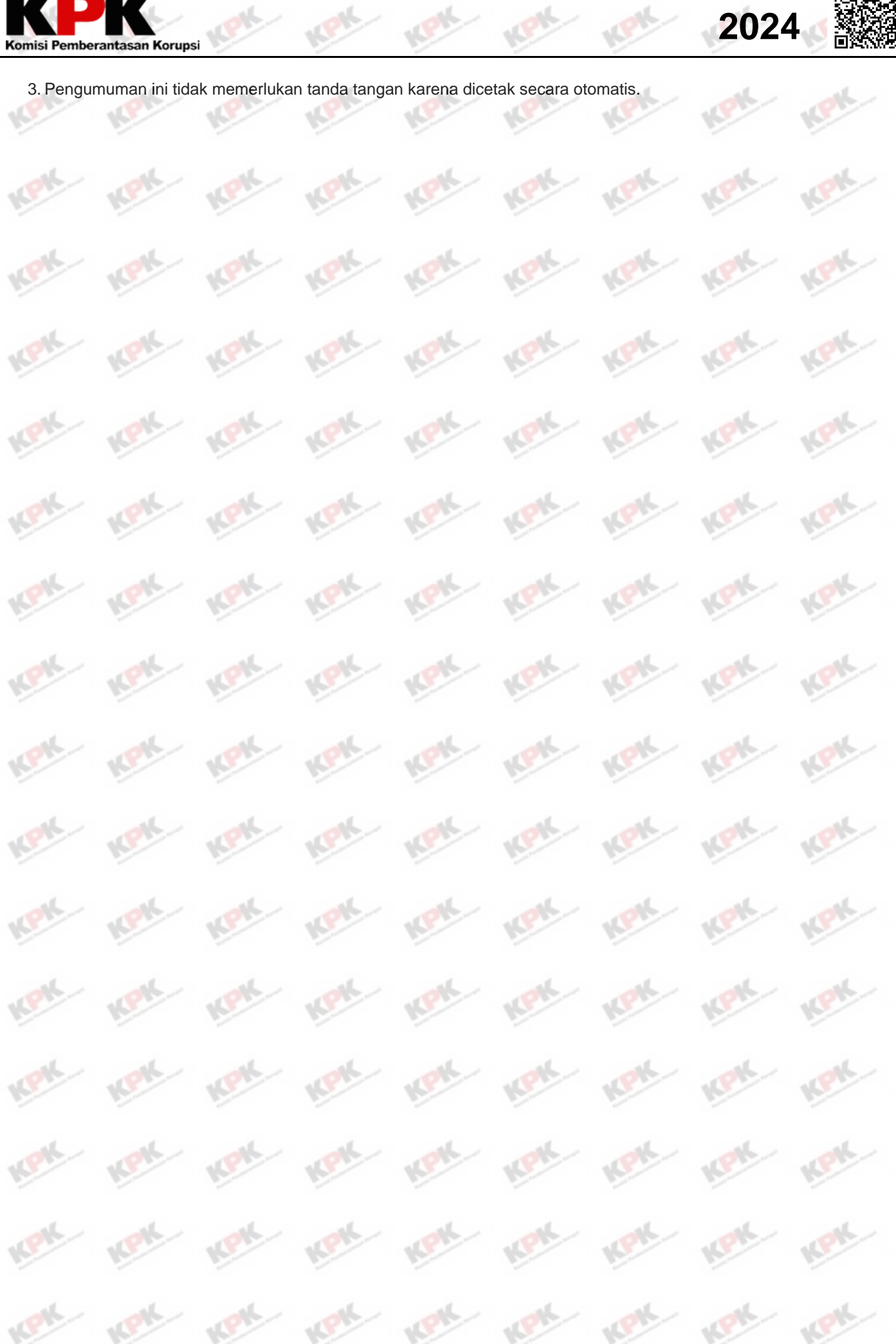
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.120.099.022

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : HERU CAHYA NUGRAHA
- Jabatan : KEPALA BIDANG
- NHK : 789578

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.400.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 225 m²/225 m² di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 198.000.000

- MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
- MOBIL, MITSUBISHI XPANDER EXCEED Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- MOBIL, SUZUKI SZ410 KATANA GX Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 60.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 10.000.000

Sub Total Rp. 1.668.000.000

III. HUTANG Rp. 814.478.726

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 853.521.274

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : **DANI RAMDANI HARUN**
- Jabatan : **KEPALA BIDANG**
- NHK : **212695**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.450.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 314 m²/60 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.224.000.000

- MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 535.000.000
- MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 618.000.000
- MOTOR, YAMAHA B3F-I A/T Tahun 2018, WARISAN Rp. 12.000.000
- MOTOR, YAMAHA SCOOTERMATIC Tahun 2023, WARISAN Rp. 59.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.158.752

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.716.858.752

III. HUTANG Rp. 608.780.874

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.108.077.878

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OPIK MAHENDRA
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 760169

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 219.000.000

1. MOTOR, HONDA TIGER Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA TOYOT A RUSH Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 303.950.362

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.667.950.362

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.667.950.362

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : HERAWATI PRARASTYANI
- Jabatan : KEPALA BALAI
- NHK : 217986

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

- Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
- Bangunan Seluas 250 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 130.000.000

- MOBIL, SUZUKI FORZA AMENITY Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
- MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 38.350.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.608.133

F. HARTA LAINNYA Rp. 150.000.000

Sub Total Rp. 1.319.958.133

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.319.958.133

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : SURYONO BUDI SANTOSA
- Jabatan : KEPALA BALAI
- NHK : 218049

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 995.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/102 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
- Tanah Seluas 922 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 398.500.000

- MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
- MOBIL, SUZUKI JEEP Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
- MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
- MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 74.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.710.329

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.479.210.329

III. HUTANG Rp. 280.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.199.210.329

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIS MUNANDAR
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 400193

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.447.500.000

1. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, WARISAN
Rp. 1.050.000.000
2. Tanah Seluas 1250 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL
SENDIRI Rp. 375.000.000
3. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL
SENDIRI Rp. 960.000.000
4. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 202.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/60 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/60 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/89 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
8. Tanah Seluas 2250 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL
SENDIRI Rp. 675.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 208.500.000

1. MOTOR, PIAGIO SCOOTER/ LX 150 IE Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, HONDA JEEP/ CRV 2,4 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000



3. MOTOR, YAMAHA MIO 125 CC SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
4. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA 1.5 SV MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
6. MOTOR, BENELLI BS 250 PE M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.409.993.344

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.065.993.344

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.065.993.344

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : **INDRI NUR SEPTIORINI**
- Jabatan : **KEPALA BALAI**
- NHK : **224469**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.665.000.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/150 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/36 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/46 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
- Tanah Seluas 738 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **311.000.000**

- MOTOR, HONDA CBR SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
- MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V Tahun 2018, HASIL SENDIRI , HADIAH , Rp. 275.000.000
- MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **11.250.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **12.930.255**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **192.020.690**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **2.192.200.945**

III. HUTANG Rp. **22.500.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **2.169.700.945**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.